

**ANALISA PENGARUH *DEFERRED TAX ASSET, DEFERRED TAX LIABILITIES*
DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA
PERUSAHAAN SUB SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN
DI INDONESIA**

Lawe Anasta

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Prasetya Mandiri

Email: Lawe.Anasta@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to demonstrate empirically that the deferred tax assets (deferred tax assets), deferred tax liabilities (deferred tax liabilities) and debt level effect on earnings manajemn proxy for discretionary accruals. As for the statistical analysis method used is multiple regression. These results indicate that the partial deferred tax liabilities (deferred tax liabilities) a significant negative effect on earnings management, while deferred tax assets (deferred tax assets) and debt levels had no significant effect on earnings management. And simultaneously Deferred tax assets (deferred tax assets), deferred tax liabilities (deferred tax liabilities) and debt levels have a significant effect on earnings management.

Keywords: *deferred tax asset, deferred tax liabilities, leverage dan manajemen laba*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris bahwa Aktiva Pajak Tangguhan (*deferred tax asset*), Kewajiban Pajak Tangguhan (*deferred tax liabilities*) dan tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen laba yang diproksi dengan akrual diskresioner. Adapun metode analisis statistik yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Kewajiban Pajak Tangguhan(*deferred tax liabilities*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan Aktiva Pajak Tangguhan (*deferred tax asset*) dan tingkat hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dan secara simultan Aktiva Pajak Tangguhan (*deferred tax asset*), Kewajiban Pajak Tangguhan(*deferred tax liabilities*) dan tingkat hutang berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Kata kunci: *deferred tax asset, deferred tax liabilities, leverage, manajemen laba*

PENDAHULUAN

Penyusunan laporan keuangan oleh manajemen bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan dan ekonomi perusahaan pada periode tertentu. Fenomena yang terjadi adalah timbulnya masalah keagenan. Sulistiyanto dan Midiastuti (2003) menyatakan bahwa manajemen perusahaan berusaha untuk memberikan sinyal positif kepada pasar tentang perusahaan yang dikelolanya. Oleh karena itu, manajer perusahaan kemudian berkeinginan untuk menaikkan laba yang dilaporkan kepada para pemegang saham dan pemakai eksternal lainnya (Deviana, 2008). Terdapat beberapa hal

yang dapat memotivasi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba menurut Scott (2000:359), yaitu motivasi rencana bonus, kontrak utang jangka panjang, motivasi perpajakan, penawaran saham perdana, penawaran obligasi perdana, dan motivasi politik. Penelitian ini didasari atas motivasi perpajakan dan motivasi politik dalam memotivasi pihak manajemen melakukan tindakan manajemen laba.

Pajak tangguhan (*deferred tax*) adalah efek pajak yang diakui pada saat diadakan penyesuaian dengan beban pajak penghasilan periode yang akan datang (Murhaban, 2003:66). Pengakuan Pajak Tangguhan (*deferred tax*) dalam laporan keuangan perusahaan adalah satu hal yang relatif baru dalam dunia akuntansi di Indonesia. Walaupun opsi penerapan pajak tangguhan dalam Akuntansi Pajak Penghasilan telah diperkenankan, akan tetapi masih banyak yang kurang memahami tentang pajak tangguhan tersebut baik dari segi pengertian atau pemahaman konseptual maupun aplikasinya ke dalam laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Pemahaman masyarakat mengenai pajak tangguhan (*deferred tax*) secara umum terkesan menimbulkan keragu-raguan, masyarakat mengartikan bahwa telah terdapat pajak yang ditangguhkan untuk dibayarkan kembali. Pemahaman masyarakat tersebut bertolak belakang dengan konsep pajak tangguhan (*deferred tax*) setelah diaplikasikan yaitu pada waktu dikenakan pajak tangguhan ternyata sama sekali tidak berkaitan dengan pembayaran pajak.

Beban pajak penghasilan dihitung dengan menggunakan aturan perpajakan atas hasil operasi perusahaan selama periode tahun yang bersangkutan. Aturan-aturan perpajakan tersebut mengharuskan perusahaan melakukan koreksi-koreksi fiskal (perbedaan permanen) karena terdapat perbedaan konsep pendapatan, cara pengukuran pendapatan, konsep biaya, cara pengukuran biaya, dan cara alokasi biaya antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Peraturan Perpajakan. Selisih laba komersial dan laba fiskal (*book-tax differences*) dapat menginformasikan tentang diskresi manajemen dalam proses akrual. Selisih tersebut dinamakan koreksi fiskal yang berupa koreksi negatif dan koreksi positif. Koreksi negatif akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan sedangkan koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan (Djamaluddin, 2008:58).

Kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (Purba, 2009:35), sedangkan aktiva pajak tangguhan adalah aktiva yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut Undang-Undang pajak (Waluyo, 2008:217). Beban pajak tangguhan dan aktiva pajak tangguhan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam merekayasa laporan keuangannya. Menurut Philips, Pincus dan Rego (2003), ada tiga motivasi utama yang mendorong perusahaan melakukan manajemen laba yaitu menghindari penurunan laba, menghindari kerugian dan menghindari kegagalan peramalan yang dibuat analisis. Motivasi pertama bertujuan untuk menghindari melaporkan penurunan laba yang berhubungan dengan hipotesis perataan laba atau *Income Smoothing Hypothesis*. Motivasi kedua bertujuan untuk menghindari kerugian, dimana hal ini dilakukan banyak alasan yang mendorong perusahaan dalam menghambat perkembangan perusahaan, faktanya bahwa perusahaan mengalami kerugian juga berpotensi menurunkan harga saham, menurunkan kepercayaan investor dan kreditor serta mendorong dilakukannya pemeriksaan pajak oleh aparat pajak. Motivasi ketiga bertujuan untuk menghindari kegagalan yang dibuat analisis.

Penelitian yang dilakukan Yulianti (2004) menemukan bukti empiris bahwa beban pajak tangguhan memiliki hubungan positif signifikan dengan probabilitas perusahaan

untuk melakukan manajemen laba guna menghindari kerugian perusahaan. Philips, Pincus dan Rego (2003) menggunakan beban pajak tangguhan atau *Deffered Tax Expense* dalam mendeteksi manajemen laba (*earning management*). Dalam penelitian tersebut digunakan model distribusi laba sebagai pengukur manajemen laba. Dalam penelitian terdahulu menyatakan bahwa dalam mengukur keleluasaan manajer, beban pajak tangguhan lebih baik dari pada akrual sebab peraturan akuntansi memberikan lebih banyak keleluasaan bagi manajer dibandingkan dengan peraturan pajak. Kesalahan pengukuran model akrual dapat dikurangi dengan memfokuskan pada beban pajak tangguhan dibandingkan dengan membagi total akrual perusahaan menjadi komponen *Discretionary* dan *Non Discretionary*. Beban pajak tangguhan mengakibatkan tingkat laba yang diperoleh menurun dan aktiva pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan laba yang lebih besar di masa yang akan datang sehingga mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan. Hubungan antara beban pajak tangguhan, aktiva pajak tangguhan, besar ukuran perusahaan dan tingkat hutang sangat erat dalam mendeteksi perilaku dari manajemen laba yaitu untuk memaksimalkan bonus yang mereka dapatkan dengan merekayasa angka akrual dan berusaha meminimalkan pajak yang mesti mereka bayarkan, dengan cara meningkatkan akrual untuk menjadikan angka laba lebih rendah. Penelitian yang dilakukan Frank dan Rego (2006) menunjukkan bahwa aktiva pajak tangguhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian Miller and Skinnner (1998), Chao et al. (2004) tidak menemukan bukti empiris bahwa manajemen menggunakan saldo akun aktiva pajak tangguhan untuk instrumen manajemen laba. Gordon an Joos (2004) menemukan bahwa akun aktiva pajak tangguhan tidak digunakan untuk merekayasa laba namun untuk mempertahankan rasio hutang dan ekuitas. Hasil penelitian Nasution dan Setiawan (2007) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut Widyaningdyah (2001) perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* tinggi akibat besarnya jumlah hutang dibanding dengan aset yang dimiliki perusahaan, diduga melakukan manajemen laba karena perusahaan terancam *default* yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang pada waktunya.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi mengatakan bahwa manajemen laba disebabkan adanya konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dengan pihak manajemen (*agent*), sedangkan teori sinyal membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan dan kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik modal (pemegang saham). Menurut Govindarajan dalam Widyaningdyah (2001) *principal* mendelegasikan tanggung jawabnya termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan kepada *agent* untuk melakukan tugas tertentu yang sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

Teori keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara agen dengan prinsipal yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya (Djamaluddin, 2008:56). Prinsipal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen, maka prinsipal tidak pernah merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Dengan demikian, prinsipal berada sebagai

asimetri informasi karena agen lebih mengetahui kinerja dan aktivitas perusahaan dibandingkan prinsipal. Adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara prinsipal dan agen memacu agen untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi yang dihasilkan dapat lebih memaksimalkan kepentingannya. Cara yang dapat dilakukan agen untuk mempengaruhi angka-angka akuntansi dapat berupa rekayasa laba atau manajemen laba dalam laporan keuangan.

Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Cara yang dapat dilakukan agen untuk Teori yang dipelopori oleh Watt dan Zimmerman (1986) memaparkan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Anis dan Imam (2003) dalam Januarti (2003) menyatakan bahwa teori akuntansi positif merupakan bagian dari teori keagenan. Hal ini dikarenakan akuntansi teori positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan yaitu (1) antara manajemen dengan pemilik (*the bonus plan hypothesis*), (2) antara manajemen dengan kreditur (*the debt to equity hypothesis*), dan (3) antara manajemen dengan pemerintah (*the political hypothesis*). Tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif yaitu (Watt dan Zimmerman, 1986).

The Bonus Plan Hypothesis. Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus yang maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan. **Pertama.** *The Debt to Equity Hypothesis.* Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam suatu perjanjian utang (*debt covenant*). Sebagian besar perjanjian utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian utang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian utang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Pelanggaran terhadap perjanjian utang dapat mengakibatkan sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba (*income increasing*) untuk menghindari atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian. **Kedua.** *The Political Cost Hypothesis*

Scott (2000) menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

Manajemen Laba (*Earning Management*)

Pada dasarnya, definisi operasional dari manajemen laba (*earning management*) menurut Belkaoui (2007:201) adalah “Perilaku yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk meningkatkan atau menurunkan laba dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri”. Definisi manajemen laba menurut Djamaluddin (2008:56) adalah perilaku yang dilakukan manajer menggunakan kebijakan (*judgment*) dalam pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan dan menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan,

atau untuk mempengaruhi *contractual outcomes* yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan.

Definisi menurut Yulianti (2005:108), *earning management* dalam arti sempit didefinisikan perilaku manajer bermain dengan komponen *discretionary accruals* dalam menentukan besarnya *earnings*. Sedangkan dalam arti luas *Manajemen Laba* didefinisikan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) probabilitas ekonomis jangka panjang.

Berdasarkan definisi di atas, pengertian manajemen laba adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memanipulasi angka-angka akuntansi yang dilaporkan kepada pihak eksternal dengan tujuan untuk keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara mengubah atau mengabaikan standar akuntansi yang telah ditetapkan, sehingga menyajikan informasi yang tidak sebenarnya.

Motivasi Manajemen Laba

Scott (2000) mengemukakan bahwa terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu motivasi bonus, motivasi kontraktual lainnya, motivasi politik, motivasi pajak, pergantian CEO, Initial Public Offering, dan pemberian informasi kepada investor. Berikut ini akan diuraikan setiap motivasi dari praktik manajemen laba. **Pertama.** Motivasi Bonus (*Bonus Purpose*). Perusahaan berusaha memacu dan meningkatkan kinerja karyawan (dalam hal ini manajemen) dengan cara menetapkan kebijakan pemberian bonus setelah mencapai target yang ditetapkan. Sering kali laba dijadikan sebagai indikator dalam menilai prestasi manajemen dengan cara menetapkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode tertentu. Oleh karena itu, manajemen berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya. **Kedua.** Motivasi Kontraktual Lainnya (*Other Contractual Motivation*). Manajer memiliki dorongan untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat memenuhi kewajiban kontraktual termasuk perjanjian utang yang harus dipenuhi karena bila tidak perusahaan akan terkena sanksi. Oleh karena itu, manajer melakukan manajemen laba untuk memenuhi perjanjian utangnya. **Ketiga.** Motivasi Politik (*Political Motivation*). Perusahaan besar dan industry strategicakan menjadi perusahaan monopoli. Dengan demikian, perusahaan melakukan manajemen laba untuk menurunkan visibility-nya dengan cara menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba bersih yang dilaporkan. **Keempat.** Motivasi Pajak (*Taxation Motivation*). Manajemen termotivasi melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. **Kelima.** Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*). Motivasi manajemen laba akan ada di sekitar waktu pergantian CEO. CEO yang akan diganti melakukan pendekatan strategi dengan cara memaksimalkan laba supaya kinerjanya dinilai baik. **Keenam.** *Initial Public Offering* (IPO). Perusahaan yang pertama kali akan go public belum memiliki nilai pasar. Oleh karena itu, manajemen akan melakukan manajemen laba pada laporan keuangannya dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan. **Ketujuh.** Pemberian Informasi Kepada Investor (*Communicate Information to Investors*). Manajemen melakukan manajemen laba agar laporan keuangan perusahaan terlihat lebih baik. Hal ini dikarenakan kecenderungan investor untuk melihat laporan keuangan dalam menilai suatu perusahaan. Pada umumnya investor lebih tertarik pada kinerja keuangan perusahaan dimasa datang dan akan menggunakan laba yang dilaporkan pada saat ini

untuk meninjau kembali kemungkinan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Peluang Manajemen Laba

Dalam proses pelaporan yang dilakukan oleh manajemen, terdapat berbagai motivasi yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba dan terdapat peluang dari kondisi dan keadaan yang timbul saat manajemen melakukan penyusunan laporan. Peluang dari kondisi dan keadaan yang timbul, yaitu (Setiowati, 2007): a. Kelemahan yang inheren dalam akuntansi itu sendiri. Fleksibilitas dalam menghitung angka laba disebabkan oleh: 1).Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda. 2).Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subyektivitas dalam menyusun estimasi. Sedangkan teknik merekayasa laba menurut Damayanti (2008:65) adalah sebagai berikut: (1) Perubahan metode akuntansi; mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode sebelumnya sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka laba. Misalnya: merubah metode depresiasi aktiva tetap dan metode jumlah angka tahun ke metode depresiasi garis lurus, dan merubah metode penilaian persediaan dan metode LIFO ke metode FIFO atau sebaliknya. (b) Memainkan kebijakan perkiraan akuntansi; manajemen mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan kebijakan perkiraan akuntansi. misalnya: kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang tidak tertagih dan kebijakan mengenai perkiraan umur aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. (c) Menggeser periode biaya atau pendapatan; menggeser periode biaya atau pendapatan sering juga disebut sebagai manipulasi keputusan operasional. Misalnya: mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan. Perataan laba mengidentifikasi batas pelaporan laba (*earnings threshold*) dan menemukan bahwa perusahaan yang berada dibawah *earnings threshold* akan berusaha untuk melewati batas tersebut dengan melakukan manajemen laba. Yulianti (2005) menyebutkan bahwa terdapat dua macam *earnings threshold*, yakni: (i) Titik pelaporan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari pelaporan kerugian;(ii) Titik perubahan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari penurunan laba.

Menurut Belkoui (2007:208) manajemen laba merupakan suatu hasil usaha untuk melewati ambang batas. Tiga ambang batas penting bagi para eksekutif adalah: (a) Untuk melaporkan laba positif yaitu melaporkan laba yang diatas nol; (b) Untuk menjaga kinerja saat ini yaitu membuat paling tidak sama dengan kinerja tahun lalu; (c) Untuk memenuhi harapan analis khususnya analis untuk peramalan laba.

Praktik-praktik manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen disesuaikan dengan motivasi melakukan manajemen laba. Manajemen laba cenderung merekayasa labanya untuk menekan besarnya pajak yang dikeluarkan sehingga perusahaan yang melaporkan laba yang lebih rendah atau kerugian berpotensi melakukan manajemen laba. Yulianti (2005) membedakan perusahaan yang memiliki laba dan yang mengalami kerugian supaya dapat memprediksi perusahaan yang memanipulasi labanya. Manajemen laba yang dilakukan baik yang bersifat konservatif sampai dengan yang ekstrim (*froud*) dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan (*users*) karena informasi yang disajikan tidak menunjukkan kinerja yang sesungguhnya. Manajemen laba bisa dikategorikan sebagai suatu penipuan yang bisa merugikan pihak-pihak yang berkepentingan seperti user, investor dan pemerintah. Dengan demikian informasi yang diberikan tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya.

Konsep Model Manajemen Laba

Dalam Akuntansi dikenal dengan istilah basis akrual dan basis kas. Pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi berbasis kas. Akrual adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terhutang (Muljono, 2009:28). Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekuitas (Elingga, 2008:52). Akrual tidak tergantung kapan penghasilan diterima dan kapan biaya dilunasi. Dengan pendekatan ini, mengakui pendapatan ketika dihasilkan dan mengakui beban pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Menurut PSAK (2010), laporan keuangan disusun berdasarkan akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Pengertian Pajak Tangguhan

Menurut Waluyo (2008:216), “Pajak Tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan”.

Metode Penangguhan Pajak Tangguhan

Dengan berlakunya PSAK 46, timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan dengan menggunakan pendekatan *asset and liability method*. Untuk mengakui pajak tangguhan, PSAK No. 46 menggunakan metode aset-kewajiban yaitu: **Pertama**. Pendekatan Aktiva. Apabila pada tahun berjalan, nilai tercatat aktiva lebih besar daripada dasar pengenaan pajak aktiva maka akan timbul perbedaan temporer kena pajak. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada kewajiban pajak penghasilan yang diakui. Kewajiban pajak penghasilan ditahun mendatang tersebut diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan (*Deferred Tax Liabilities*) pada tahun berjalan. Sebaliknya jika nilai tercatat aktiva lebih kecil daripada dasar pengenaan pajak aktiva maka akan timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada manfaat ekonomi yang diperoleh dalam bentuk pengurangan pajak penghasilan. Pengurangan pajak penghasilan di tahun mendatang tersebut diakui sebagai aktiva pajak tangguhan (*Deferred Tax Assets*) pada tahun berjalan. Aktiva pajak tangguhan (*Deferred Tax Asset*), timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil dari pada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian; **Kedua**. Pendekatan Kewajiban. Apabila pada tahun berjalan, nilai tercatat kewajiban lebih besar daripada dasar pengenaan pajak kewajiban maka akan timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada manfaat ekonomi yang diperoleh dalam bentuk pengurangan pajak penghasilan. Pengurangan pajak penghasilan di tahun mendatang tersebut diakui sebagai aktiva pajak tangguhan (*Deferred Tax Asset*) pada tahun berjalan. Sebaliknya apabila nilai tercatat

kewajiban lebih kecil daripada dasar pengenaan pajak kewajiban maka akan timbul perbedaan temporer kena pajak. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada kewajiban pajak penghasilan yang diakui. Kewajiban pajak penghasilan di tahun mendatang tersebut diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan (*Deferred Tax Liabilities*) pada tahun berjalan. Kewajiban pajak tangguhan (*Deferred tax liabilities*), timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi negatif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Perbedaan Temporer atas Pajak Tangguhan

Perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan antara dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu aktiva atau kewajiban dengan nilai tercatat aktiva atau kewajiban, yang akan berakibat pada kenaikan atau bertambahnya laba fiskal periode mendatang (Purba, 2009:17). Pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban diselesaikan atau dilunasi. Zain (2007:98) menyatakan bahwa perbedaan temporer yang mengakibatkan harus diakui aktiva dan/atau kewajiban pajak tangguhan terjadi atau timbul apabila: (1) Adanya penghasilan dan/atau beban yang harus diakui untuk penghitungan laba fiskal dan untuk penghitungan laba akuntansinya dalam periode yang berbeda; (2) Bagian dari biaya perolehan dalam suatu penggabungan usaha, yang secara substansi merupakan suatu akuisisi, dialokasikan kepada aktiva atau kewajiban tertentu berdasarkan nilai wajarnya dan penyesuaian atau perlakuan akuntansi demikian tidak diperkenankan oleh peraturan perpajakan; (3) *Goodwill* atau *goodwill* negatif yang timbul dalam konsolidasi; (4) Perbedaan nilai tercatat dengan dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu aktiva atau kewajiban pada saat pengakuan awalnya.

Deferred Tax Asset

Deferred Tax Asset adalah aktiva yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut Undang-Undang pajak (Waluyo, 2008:217). *Deferred Tax Asset* disebabkan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Besarnya aset pajak tangguhan dicatat apabila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak di masa yang akan datang. Oleh karena itu dibutuhkan *judgment* untuk menaksir seberapa mungkin aset tangguhan tersebut dapat direalisasikan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007), nilai tercatat aset pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada tanggal neraca.

Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai. Dengan adanya kewajiban untuk melakukan peninjauan kembali pada tanggal neraca, maka setiap tahun manajemen harus membuat suatu penilaian untuk menentukan saldo aset pajak tangguhan dan pencadangan aset pajak tangguhan, sedangkan penilaian manajemen untuk menentukan saldo cadangan aset pajak tangguhan tersebut bersifat subjektif (Suranggane, 2007:81).

Dengan diberlakukannya PSAK No.46 yang mensyaratkan para manajer untuk mengakui dan menilai kembali aset pajak tangguhan yang dapat disebut pencadangan nilai

aset pajak tangguhan. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aset pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tidaknya rekayasa laba atau manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan dalam rangka menghindari penurunan atau kerugian laba.

Deferred Tax Liabilities

Menurut Harnanto (2003:115), *Deferred Tax Liabilities* adalah kewajiban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Penyebab perbedaan antara kewajiban pajak penghasilan dengan PPh terhutang menurut Purba (2009:14), dapat dikategorikan dalam dua kelompok: **Pertama**. Perbedaan Permanen atau Tetap. Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial secara permanen. **Kedua**. Perbedaan Temporer atau Waktu. Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang, misalnya: (a) Metode penyusutan, yang diakui fiskal adalah saldo menurun dan garis lurus; (b) Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan Rata-rata; (c) Penyisihan piutang tak tertagih, yang diakui fiskal kecuali untuk Perusahaan Pertambangan, *Leasing*, Perbankan dan Asuransi; (d) Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari Menteri Perekonomian sedangkan yang diakui oleh akuntansi adalah kurs dari Bank Indonesia.

Kewajiban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena pajak. Namun, tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Menurut Purba (2009:35) terdapat pengecualian-kecualian sebagai berikut: (1) Kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer investasi pada perusahaan asosiasi, anak perusahaan, dan *joint venture* tidak diakui apabila induk perusahaan dan patner dapat mengendalikan waktu reversal beda temporer tersebut; (2) Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan awal goodwill yang berasal dari penggabungan usaha; (3) Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan aktiva dan kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha tersebut tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba yang dikenakan pajak.

Beda waktu terjadi adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal. Selisih dari perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang akan menghasilkan koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aset pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan.

Tingkat Hutang

Hutang yang dipergunakan secara efisien dan efektif akan meningkatkan nilai perusahaan tetapi hutang juga dapat dijadikan alasan untuk memicu manajer melakukan manajemen laba. Tingginya risiko perusahaan yang diukur dengan rasio hutang yang

tinggi, dapat membuat manajemen “bermain” dengan nilai rasio tersebut untuk melakukan manajemen laba. Menurut Widyaningdyah (2001) perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* tinggi akibat besarnya jumlah hutang dibanding dengan aset yang dimiliki perusahaan, diduga melakukan manajemen laba karena perusahaan terancam *default* yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang pada waktunya.

Penelitian mengenai *deferred tax asset*, *deferred tax liabilities* dan akrual telah banyak dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut banyak memberikan kontribusi tambahan bagi akuntan pihak perpajakan untuk mendeteksi dan mengatasi terjadinya praktik manajemen laba. Penelitian ini diilustrasikan pada tabel 2.1 menunjukkan hasil penelitian terdahulu terkait *deferred tax asset*, *deferred tax liabilities* dan manajemen laba. Burgstahler, *et al.* (2002), Asset pajak tangguhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Philips, J., M. Pincus, and S. Rego. 2003. Beban Pajak Tangguhan memiliki indikasi dalam melakukan manajemen laba. Yulianti, (2004). Beban pajak tangguhan memiliki hubungan positif signifikan dengan probabilitas perusahaan untuk melakukan manajemen laba guna menghindari kerugian perusahaan. Zulaikha dan Hari Laksito. (2009) Perbedaan temporer yang diproksi dgn Hutang Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap penilaian aktiva pajak tangguhan. Imbalan pasca kerja dan rata-rata laba berpengaruh terhadap penilaian aktiva pajak tangguhan.

Pengembangan Hipotesis Penelitian. Pengaruh *Deferred Tax Asset* Terhadap Manajemen Laba

Semakin besar perbedaan antara laba yang dilaporkan perusahaan (laba komersial) dengan laba fiskal menunjukkan bendera merah bagi pengguna laporan keuangan. Selisih positif antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan terjadinya koreksi positif yang menimbulkan terjadinya *deferred tax asset* (Suranggane, 2007:78). *Deferred tax asset* terjadi bila laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal akibat perbedaan temporer. Lebih kecilnya laba akuntansi dari laba fiskal mengakibatkan perusahaan menunda pajak terutang periode mendatang. Berdasarkan penelitian Suranggane (2007) bahwa *deferred tax asset* dijadikan proksi sebagai indikator dari praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. *Deferred tax asset* yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen dimotivasi adanya pemberian bonus, beban politis atas besarnya perusahaan dan minimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka diekspektasikan adanya peranan antara *deferred tax asset* yang dapat dimungkinkan dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba. Jika jumlah *deferred tax asset* semakin besar maka semakin tinggi manajemen melakukan manajemen laba (*earning management*), untuk itu dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1: *Deferred tax asset* mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan subsektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pengaruh *Deferred tax Liabilities* Terhadap Manajemen Laba

Semakin besar persentase *deferred tax liabilities* terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan standar akuntansi yang semakin liberal (Yulianti, 2004). Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal memiliki hubungan positif dengan insentif pelaporan keuangan seperti *financial distress* dan pemberian bonus, dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba atau

earnings management dengan memperbesar atau memperkecil jumlah beban pajak tangguhan yang diakui dengan laporan laba rugi. Selisih negatif antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan terjadinya koreksi negatif yang menimbulkan terjadinya *deferred tax liabilities* (Djamaludin, 2008:58). Beban yang besar akan menurunkan tingkat laba yang diperoleh suatu perusahaan, begitu pula sebaliknya beban yang sedikit akan menaikkan tingkat laba yang diperoleh perusahaan.

Berdasarkan penelitian Philips. et al (2003) membuktikan adanya praktik manajemen laba dengan menggunakan beban pajak tangguhan. Penelitian yang dilakukan Yulianti (2004) juga menemukan bukti empiris bahwa *deferred tax liabilities* memiliki hubungan positif signifikan dengan probabilitas perusahaan untuk melakukan manajemen laba guna menghindari kerugian perusahaan. Manajemen laba merupakan peluang bagi manajemen untuk merencanakan besarnya beban pajak tangguhan guna menaikkan dan menurunkan tingkat labanya. *Deferred tax liabilities* mengakibatkan tingkat laba yang diperoleh menurun dengan demikian memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan laba yang lebih besar di masa yang akan datang dan mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut diatas maka diekspektasi peranan yang signifikan antara *deferred tax liabilities* dengan manajemen laba (*earnings management*). Manajemen Laba dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan jumlah beban yang diakui dalam laporan laba rugi. Dengan demikian dibuat hipotesis sebagai berikut:

H2: *Deferred tax liabilities* mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan subsektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan Terhadap Manajemen Laba

Menurut Widyaningdyah (2001) perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* tinggi akibat besarnya jumlah hutang dibanding dengan aset yang dimiliki perusahaan, diduga melakukan manajemen laba karena perusahaan terancam *default* yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang pada waktunya. Halim, dkk. (2005) menguji pengaruh asimetri informasi, kinerja masa kini dan masa mendatang, tingkat hutang, ukuran perusahaan, *return* kumulatif, dan *current ratio* terhadap manajemen laba. Penelitian dilakukan pada 34 perusahaan dengan periode waktu Februari dan Agustus (2001) serta Februari dan Agustus (2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi, kinerja masa kini dan masa mendatang, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan *return* kumulatif dan *current ratio* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Suwito dan Herawaty (2005) selama tahun 2000-2002 melakukan penelitian mengenai pengaruh jenis usaha, ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, tingkat hutang, dan *net profit margin* terhadap tindakan perataan laba. Hasil penelitian pada 60 perusahaan menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari jenis usaha, ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, tingkat hutang, dan *net profit margin* terhadap tindakan perataan laba. Dari hasil beberapa penelitian terkait tingkat hutang terhadap manajemen laba, maka penulis membuat hipotesis untuk menguji konsistensi dari variabel tingkat hutang, adapun hipotesisnya adalah:

H3: Tingkat hutang perusahaan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan subsektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

METODE

Definisi & Operasionalisasi Variabel. Manajemen Laba

Variabel dependen pada penelitian ini adalah manajemen laba, adapun proksi untuk manajemen laba ini adalah akrual diskresioner. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Healy (1985), umumnya langkah pertama dalam pengukuran *Discretionary Accruals* adalah total accruals, dimana total accruals tersebut terdiri dari komponen *Non Discretionary Accruals (NDA)* dan *Discretionary Accruals (DA)*. Selanjutnya model yang digunakan dalam penelitian ini mengaplikasikan model Healy (1985) untuk memperoleh komponen *Non Discretionary accruals*. Manajemen laba dalam penelitian ini dijelaskan menggunakan *proxy Discretionary Accruals* dan model persamaan yang digunakan untuk menghitung total akrual adalah sebagai berikut :

$$TACC_{it} = IBEI_{it} - (CFO_{it} - EIDO_{it}) \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan: TACC it = Total akrual perusahaan i untuk tahun t; IBEI it = *Income before extraordinary item* perusahaan i tahun t.; CFO it = *Cash flow operating activities* perusahaan i untuk tahun t. ; EIDO it = *Extraordinary items & discontinued operations* dari laporan arus kas perusahaan i untuk tahun t.

Model persamaan tersebut diatas akan diestimasi dengan *pooling* seluruh perusahaan sampel. Adapun pada total akrual itu sendiri masih terdapat unsur komponen akrual diskresioner dan komponen yang non akrual diskresioner. Pada model Healy ini menghitung *discretionary accruals* adalah membagi rata-rata total akrual dengan total aktiva periode sebelumnya. Oleh sebab itu total akrual selama periode estimasi merupakan representasi ukuran *discretionary accruals* dan dirumuskan sebagai berikut:

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} \dots\dots\dots(2)$$

Notasi: DA it = *Discretionary accruals* untuk perusahaan i pada periode t; TA it = merupakan total akrual perusahaan I pada periode t; Ait-1 = merupakan total aset perusahaan i pada periode t-1.; Pengukuran ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Denis Priantinah (2008).

Deferred Tax Asset

Deferred Tax Asset merupakan selisih antara *deferred tax asset* periode sekarang dengan periode sebelumnya. Pada penelitian ini untuk menghitung *deferred tax asset* mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Suranggane (2007), *deferred tax asset* diukur dengan perubahan nilai *deferred tax asset* pada akhir periode t dengan t -1 dibagi dengan nilai *deferred tax asset* pada akhir periode t-1.

Dihitung dengan rumus :

$$Deferred\ tax\ asset\ it = \frac{\Delta\ deferred\ tax\ asset\ it}{deferred\ tax\ asset\ i\ t-1}$$

Notasi: *Deferred tax asset* it = Nilai *deferred tax asset* pada perusahaan i periode t ; Δ *Deferred tax asset* it = Perubahan nilai *deferred tax asset* pada perusahaan i akhir periode t dengan periode $t-1$; *Deferred tax asset* $i t-1$ = Nilai *deferred tax asset* pada perusahaan i periode $t-1$

Deferred Tax Liabilities

Pada penelitian ini *deferred tax liabilities* yang dijadikan variabel penelitian ini diperoleh dari *deferred tax liabilities* pada periode laporan keuangan dibagi dengan total aktiva pada periode sebelumnya. Pengukuran ini mengacu pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Yulianti (2004).

$$\text{Deferred tax liabilities } it = \frac{\text{Deferred tax liabilities } it}{\text{Total Aktiva } i t-1}$$

Notasi: *Deferred tax liabilities* it = Total *Deferred tax liabilities* pada laporan keuangan perusahaan i periode t ; Total Aktiva $i t-1$ = Total Aset pada laporan keuangan perusahaan i periode $t-1$

Tingkat Hutang

Pada penelitian ini pada pengukuran tingkat hutang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Widyaningdyah (2001), tingkat hutang dihitung dengan rumus:

$$\text{Tingkat Hutang} = \frac{\text{Total Debt } it}{\text{Total Asset } it}$$

Notasi: Total Debt it = Total hutang pada laporan keuangan perusahaan i periode t ; Total Asset it = Total aset pada laporan keuangan perusahaan i periode t

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan industri subsektor makanan dan minuman yang listing di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan metode penentuan sampel yang penulis gunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pengumpulan data atas dasar pertimbangan sebagai berikut: (1) Perusahaan yang listing atau telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia; (2) Menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit pada periode penelitian 2010-2013; (3) Perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya dengan lengkap; (4) Perusahaan-perusahaan yang digolongkan masuk dalam industri subsektor makanan dan minuman.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam tesis ini adalah metode Studi Kepustakaan, Metode ini dilakukan dengan cara mengambil referensi dari buku-buku dan sumber tulisan lainnya yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Data yang penulis ambil adalah berupa data Sekunder yaitu merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain, dan peneliti dapat memanfaatkannya untuk diproses lebih lanjut. Yaitu berupa data yang diperlukan dalam penelitian ini yang selanjutnya penulis ambil untuk diolah sebagai variabel – variabel penelitian. Adapun sifat data yang

penulis gunakan adalah merupakan data kuantitatif dan menurut waktu pengumpulannya merupakan data *time series* (data deret waktu) yaitu merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu dalam beberapa interval waktu tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Diskresional akrual pada perusahaan sampel yang terendah adalah sebesar 0.000020 dan tertinggi sebesar 0.109002. Perusahaan sampel sektor makanan dan minuman pada periode pengamatan secara rata-rata melakukan tindakan manajemen laba sebesar 0.035 atau 3.5 %. *Deffered tax asset* pada perusahaan sampel yang terendah adalah sebesar -0.255715 dan yang tertinggi sebesar 0.707989 dan secara rata-rata pada perusahaan sampel tersebut terdapat koreksi positif yang lebih tinggi atas perbedaan temporer hasil rekonsiliasi fiskal sebesar 0.175 atau 17.5 %. Rasio *deffered tax liabilities* terhadap total asset periode sebelumnya pada perusahaan sampel, memiliki nilai yang terendah adalah sebesar 0.0000030 dan yang tertinggi adalah sebesar 0.400700. Secara rata-rata pada perusahaan sampel terdapat perbedaan koreksi negatif atas perbedaan temporer hasil rekonsiliasi fiskal sebesar 0.068 atau 6.8 %. Rasio hutang terhadap aset (*debt to total asset*) pada perusahaan sampel yang terendah adalah sebesar 0.06500, dan yang tertinggi adalah sebesar 0.847000. Secara rata-rata rasio tingkat hutang atau kewajiban perusahaan sampel terhadap kekayaan atau harta perusahaan adalah sebesar 0.468 atau 46.8 % (masih dibawah 50%). Ukuran perusahaan yang diproksi dengan total asset pada perusahaan sampel yang memiliki aset terendah adalah sebesar 23.28 milyar dan yang tertinggi adalah sebesar 31.98 milyar. Secara rata-rata pada perusahaan sampel memiliki nilai asset sebesar 28,2 milyar.

Uji Normalitas Data

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk menentukan apakah distribusi data yang digunakan normal atau tidak. Nilai residual hasil regresi yang akan diuji normalitas datanya. Uji yang dilakukan adalah uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*, Hasil uji normalitas distribusi data menunjukkan bahwa hasil residual memiliki nilai *Asymp.sig (2-tailed)* lebih besar dari alpha (0,05) yaitu sebesar 0,365. Dari hasil analisis uji normalitas untuk nilai residual tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebaran data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi apakah antara variabel-variabel independen yang digunakan mempunyai kolinearitas yang tinggi atau tidak, dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *Tolerance* (TOL) untuk semua variabel independen dalam penelitian ini yaitu *deffered tax asset* (DTA) , *deffered tax liabilities* (DTL), tingkat hutang (LEV) dan ukuran perusahaan (SIZE_FIRM) lebih besar dari 0,10 jika lebih besar dari 0,10 maka tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk semua variabel independen dalam penelitian ini kurang dari 10, jika nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF), maka dapat dideteksi bahwa semua variabel independen tidak terdapat unsur multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Identifikasi terhadap asumsi ini dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson. Autokorelasi tidak terjadi apabila angka Durbin-Watson berada di antara -2 sampai +2. Jika angka Durbin-Watson dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif dan jika angka Durbin-Watson diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Pada Tabel 1 menunjukkan nilai Durbin Watson memiliki nilai sebesar 1.631. Nilai tersebut berada pada rentang angka ambang batas diantara -2 sampai +2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur autokorelasi dalam penelitian ini.

Tabel 1. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.492 ^a	.242	.191	.028489362	1.631

a. Predictors: (Constant), SIZE_FIRM, LEVERAGE, DTA, DTL

b. Dependent Variable: DA

Heteroskedastisitas

Untuk meyakinkan tidak adanya unsur heteroskedastisitas dilakukan juga uji Glejser yang hasilnya menunjukkan nilai signifikansi yang lebih besar dari $\alpha=0,05$ pada tiap-tiap variabel independen yaitu *deffered tax asset* (DTA) sebesar 0.853, *deffered tax liabilities* (DTL) sebesar 0.101 dan tingkat hutang (*Leverage*) sebesar 0.608 sedangkan variabel kontrol ukuran perusahaan sebesar 0.112 terhadap variabel dependen hasil residual yang diabsolutkan (*ABS_RES*). Bila probabilitas signifikansinya diatas 5% maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan Apabila probabilitas signifikansinya di bawah 5% mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. (Ghozali, 2005: 108). Dengan hasil uji Glejser tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terindikasi adanya unsur heteroskedastisitas

Koefisien Determinansi (R^2)

Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak bebas (dependen) yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya (independen). Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel terikat (dependen) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. R^2 menunjukkan seberapa besar variasi variabel-variabel penjelas (independen) mempengaruhi variasi variabel tidak bebas (dependen). Hasil *goodness of fit* dapat dilihat pada koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka sebesar 0.242, dan *adjusted R Square* sebesar 0.191. Ini memberi arti bahwa 19,1 % dari total variasi dependen yaitu manajemen laba (*earnings management*) dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu *deffered tax asset*, *deffered tax liabilities*, tingkat hutang dan ukuran perusahaan. Dan sisanya sebesar 80,9 % adalah faktor-faktor lain diluar variabel penelitian ini.

Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 1

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan variabel aset pajak tangguhan (*deffered tax asset*) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan melakukan manajemen

laba yang diproksi dengan akrual diskresioner dalam hal untuk menghindari kerugian perusahaan. Secara teoritis aset pajak tangguhan dapat dijadikan celah untuk melakukan manajemen laba, pada hasil penelitian ini perusahaan sampel cenderung menghindari terjadinya koreksi fiskal yang besar yang berdampak pada besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Berbeda dengan pernyataan Burgstahler, *et al.* (2002) bahwa manajer memanipulasi aset pajak tangguhan (*deffered tax asset*) dalam upaya meningkatkan laba perusahaan, hal ini dimungkinkan oleh beberapa faktor seperti ketentuan perpajakan yang berbeda pada tiap negara. Kondisi di Indonesia aset pajak tangguhan (*deffered tax asset*) sangat erat keterkaitannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan melakukan rekayasa jumlah aset pajak tangguhan (*deffered tax asset*) pada laporan keuangan komersil maka konsekuensinya terdapat pada laporan keuangan fiskal, yaitu jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dapat menjadi lebih besar. Perusahaan subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia pada masa periode pengamatan tidak menjadikan aset pajak tangguhan (*deffered tax asset*) sebagai sarana atau alat untuk melakukan manajemen laba, hal ini berdasarkan pada hasil uji parsial yang dilakukan. Manajer mempertimbangkan secara detail kemungkinan resiko-resiko dan kerugian yang lebih besar untuk merekayasa komponen aset pajak tangguhan dalam upaya meningkatkan laba tersebut. Risiko utama yang bisa timbul akibat pengakuan pajak tangguhan adalah: (1) Pajak tangguhan (baik yang asset maupun liabilitas) akan lebih merepotkan, karena pengakuan pajak tangguhan bersifat sementara. Artinya, apabila diyahun berikutnya selisih tersebut benar-benar menjadi kewajiban PPh yang harus dibayar, maka liabilitas pajak tangguhan tersebut harus diakui sebagai utang PPh. (2) Transaksi akan menggantung dan menumpuk, hal ini yang paling banyak terjadi ketika perusahaan mengakui adanya aset pajak tangguhan (pajak tangguhan yang masuk kelompok asset). Apabila nantinya benar-benar timbul perbedaan yang mengakibatkan kewajiban PPh menurun atau setelah pemeriksaan oleh DJP menghasilkan ketetapan pajak yang lebih kecil tidak akan menjadi masalah, tetapi jika sebaliknya maka bisa menggantung bertahun-tahun. Dan pada tahun-tahun berikutnya ada pengakuan asset pajak tangguhan yang baru, maka akan semakin terjadi penumpukan. (3) Laporan keuangan menjadi diragukan atau tidak kredibel, pengakuan pajak tangguhan (baik yang asset maupun liabilitas yang terus meningkat dan tak kunjung terhapus ini akan menjadi perhatian pengguna yang mempunyai kepentingan seperti kreditur/pemegang saham dan yang pasti dapat menangkap keanehan ini. Hal ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan pemegang saham dan kreditur terhadap laporan keuangan yang disajikan. Pengakuan asset atau liabilitas yang menggunakan estimasi atau rata-rata sangat berpotensi menyebabkan ketidakhandalan laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan atau konsisten dengan penelitian Bauman, *et al.* (2000), Zulaikha (2007), dan Suranggane (2007) yang menyatakan bahwa aktiva pajak tangguhan (*deffered tax asset*) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 2

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan variabel kewajiban pajak tangguhan (*deffered tax liabilities*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan melakukan manajemen laba dalam hal untuk menghindari kerugian perusahaan. Yulianti (2005) menyatakan bahwa kewajiban (aset) pajak tangguhan meningkat ketika perusahaan mempercepat pengakuan pendapatan atau menanggukhan pengakuan beban (mempercepat beban atau menanggukhan pendapatan) untuk kepentingan akuntansi dibandingkan dengan

kepentingan perpajakan perusahaan tersebut. Dengan pola seperti ini, maka perusahaan tersebut akan melaporkan laba akuntansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba menurut perpajakan, sehingga akan meningkatkan kewajiban pajak tangguhan bersih (*deffered tax liabilities*) perusahaan tersebut begitupula sebaliknya. Hasil ini terkait dengan teori akuntansi positif (*positive accounting theory*) tentang hipotesis program bonus (*Bonus Plan Hypothesis*). Dengan demikian dapat dikatakan pada perusahaan sampel sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia memiliki rencana pemberian bonus. CEO (*Chief Executif Officer*) pada perusahaan sampel cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaan, dan ini mengintegrasikan kinerja mereka. Dengan kinerja yang memenuhi target laba maka memperoleh bonus yang maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja CEO (*Chief Executif Officer*) diukur dengan besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan.

Karena variabel *deffered tax liabilities* (DTL) berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, maka hasil dari penelitian ini sesuai atau konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulianti (2005), Zulaikha dan Hari Laksito(2009). Pada penelitiannya *deffered tax liabilities* berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 3

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan variabel tingkat hutang (*leverage*) tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba yang diproksi dengan akrual diskresioner. Penggunaan utang yang relatif tinggi menimbulkan biaya tetap berupa beban bunga. Bunga utang ini harus dibayarkan oleh perusahaan berapapun laba yang diterimanya. Semakin banyak perusahaan menggunakan utang, maka akan semakin besar bunga utang yang harus dibayarkan. Artinya tingkat *leverage financial* semakin tinggi. Para investor biasanya enggan menginvestasikan dananya pada perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi karena *return* yang akan diterima menjadi lebih rendah. Hal ini disebabkan laba perusahaan atau EBIT (*Earning Before Interest and Tax*) harus dikurangi bunga utang (*interest*) yang jumlahnya besar akibat penggunaan utang yang besar, sehingga EPS (*Earning per Share*) dan EAT (*Earning After Tax*) perusahaan menjadi rendah. Investor lebih suka menginvestasikan dananya pada perusahaan yang memiliki EAT tinggi, yang berarti *return* yang diterima juga akan tinggi. Pada perusahaan sampel di industri sektor makanan dan minuman tidak menjadikan hutang atau *leverage* sebagai tujuan untuk melakukan manajemen laba melainkan untuk tujuan meningkatkan kinerja operasi perusahaan. Perusahaan dengan skala ekonomi yang besar biasanya memiliki output atau skala operasi yang juga besar. Hal ini menyebabkan biaya rata-rata operasi (*leverage operasi*) perusahaan semakin menurun. Artinya perusahaan menjadi lebih efisien sehingga kemungkinan *return* yang diterima perusahaan dari hasil penjualan menjadi semakin meningkat. Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan penelitian Suwito dan Herawaty (2005), serta Warsilah, Bao dan Bao dalam Tarjo (2008), namun tidak konsisten dengan penelitian Widyaningdyah (2001), Halim, dkk. (2005), serta Tarjo (2008).

Seperti yang telah dijelaskan oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam Yulianti (2005), bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pengurangan pajak yang berhubungan dengan pembayaran bunga atas hutang. Perusahaan akan menyesuaikan tingkat hutangnya kepada tingkat rata-rata hutangnya dalam jangka panjang. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh pajak, yaitu sebagai faktor yang mendorong perusahaan untuk

meningkatkan hutangnya. Perusahaan meningkatkan hutangnya karena bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat mengurangi pajak perusahaan. Dalam hal ini hutang bertindak sebagai *tax shields* karena dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk pembayaran bunga kepada pihak yang memberikan hutang.

Pada variabel kontrol ukuran perusahaan hasilnya konsisten dengan penelitian Halim, dkk. (2005), Siregar dan Utama (2005), serta Nuryaman (2008) tetapi tidak konsisten dengan penelitian Suwito dan Herawaty (2005), serta Nasution dan Setiawan (2007). Berarti *firm size* (ukuran perusahaan) dapat memotivasi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar peluang perusahaan memperoleh laba dari aktivitas bisnisnya. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan ukuran perusahaan akan meningkatkan praktik manajemen laba. Semakin besar perusahaan dengan jumlah asset yang besar memungkinkan pihak manajemen perusahaan melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk pengelolaan laba.

PENUTUP

Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh dari aktiva pajak tangguhan (*Deferred tax asset*), kewajiban pajak tangguhan (*Deffered tax liabilities*) dan tingkat hutang terhadap manajemen laba. Simpulan yang dapat ditarik dari hasil pengujian adalah: (1) *Deferred tax asset* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba yang diproksi dengan akrual diskresioner. Aktiva pajak tangguhan (*deffered tax asset*) sangat erat kaitannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan melakukan rekayasa jumlah aktiva pajak tangguhan (*deffered tax asset*) pada laporan keuangan komersil maka konsekuensinya adalah pada laporan keuangan fiskal, yaitu jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dapat menjadi lebih besar. Manajer harus mempertimbangkan kemungkinan resiko-resiko dan kerugian yang lebih besar untuk merekayasa komponen aktiva pajak tangguhan (*deferred tax asset*) dalam upaya meningkatkan laba tersebut. (2) *Deffered tax liabilities* (DTL) berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba yang diproksi dengan akrual diskresioner. Perusahaan subsektor makanan dan minuman pada periode sampel cenderung menggunakan pola melaporkan laba akuntansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba menurut perpajakan (fiskal), sehingga akan meningkatkan kewajiban pajak tangguhan bersih (*deffered tax liabilities*) perusahaan tersebut. (3) Tingkat Hutang (*Leverage*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Pada periode sampel perusahaan subsektor makanan dan minuman di Indonesia hutang bukan menjadi pendorong untuk melakukan tindakan manajemen laba tetapi semata-mata untuk kebutuhan modal kerja perusahaan dengan tujuan meningkatkan produksi dan peningkatan laba.

Beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Sampel penelitian ini hanya terdiri dari perusahaan pada subsektor makanan dan minuman sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digunakan sebagai dasar generalisasi; (2) Periode pengamatan yang relatif pendek untuk menaksir parameter-parameter model penelitian; (3) Kemungkinan terdapat kemampuan yang rendah dari *discretionary accrual* model Healy (1985) yang dipakai sebagai proksi manajemen laba; (4) Nilai *adjusted R square* yang rendah menunjukkan banyak faktor lain yang

memotivasi manajer melakukan manajemen laba yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh aktiva pajak tangguhan (*Deferred tax asset*), kewajiban pajak tangguhan (*Deffered tax liabilities*) dan tingkat hutang (*Leverage*) terhadap manajemen laba, maka penulis akan memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: (1) Pada penelitian ini penulis menggunakan periode pengamatan yang relatif pendek yaitu selama tiga tahun, rentang tahun 2010 – 2013 dan pada jenis industri subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode pengamatan yang relatif lebih panjang dan memasukan faktor dari berbagai jenis industri untuk dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan otentik pengaruh pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Dengan demikian dapat diketahui apakah pajak tangguhan pada setiap jenis industri juga memiliki pengaruhnya terhadap tindakan melakukan manajemen laba.; (2) Pada penelitian ini penulis menggunakan model Healy (1985) untuk pengukuran manajemen laba yang diproksi oleh akrual diskresioner yang relatif sederhana, sangat lebih baik jika pada penelitian berikutnya membandingkan atau mendeteksi *discretionary accrual* dengan menggunakan model lainnya sebagai proksi manajemen laba, seperti model Jones(1991), model Dechow (1995). Dikarenakan model ini paling sering digunakan dalam pengukuran manajemen laba. Diharapkan dengan menggunakan beberapa model dalam mendeteksi manajemen laba dapat memberikan hasil yang lebih empiris, apakah terdapat perbedaan dalam mendeteksi manajemen laba dengan beberapa macam model tersebut; (3) Variabel Independen yang digunakan penulis hanya tiga, yaitu *deffered tax asset*, *deffered tax liabilities* dan tingkat hutang. Penulis berharap pada penelitian selanjutnya hendaknya memasukan faktor lainnya yang memotivasi manajer melakukan manajemen laba. Secara teoritis disebutkan bahwa manajer melakukan tindakan manajemen laba disebabkan oleh faktor motivasi perubahan *Chief Executif Officer (Changes of CEO Motivations)* Manajemen laba juga terjadi disekitar waktu pergantian CEO. Hipotesis program bonus memprediksi bahwa ketika waktu mendekati pengunduran diri CEO maka tindakan yang dilakukan adalah memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonus mereka. Sedangkan CEO yang kinerjanya buruk akan melakukan manajemen laba untuk memaksimalkan laba mereka dengan tujuan mencegah atau menunda pemberhentian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Utari Widyaningdyah (2001) “Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Earnings Management Pada Perusahaan Go Public di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, November Vol. 3 No. 2, hal 165-172
- Burgstahler, *et al.* (2002) How firms avoid losses: evidence of use the net deferred tax asset account.
- Damayanti, Theresia. (2008) “Perbandingan Akrual dan Pajak Tangguhan dalam Pengujian Aliran Kas Masa Datang dan Return Saham”. *Jurnal Akuntansi/Tahun XII*, No. 03. hal 250-259.

- Denis Priantinah. (2008) "Eksistensi Earnings Manajemen Dalam Hubungan Agen-Prinsipal". *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* Vol. VI. No. 2, hal. 23 -36.
- Deviana, Birgita. (2008) "Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Kini Dalam Mendeteksi Manajemen Laba pada Seasoned Equity Offerings". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia /Tahun 2008* Vol. XII, No. 02, hal 132-143
- Djamaluddin, Subekti. (2008) "Analisis Perbedaan Antara Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba, Akrua, dan Aliran Kas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 11, No. 1, hal. 52-74.
- Elingga, Muna. (2008) "Pengaruh Komponen Akuntansi Akrua Sebagai Prediktor Arus Kas Koperasi pada Saat Krisis dan Setelah Krisis". *Jurnal Akuntansi/Tahun XII*, No. 02, hal 132-144
- Frank, Mary Margaret dan Sonja Olhoft Rego. (2006) "Do managers use the valuation allowance account to manage earnings around certain earnings target?" *The Journal of The American Taxation Association*. Vol. 28. No. 1. Spring. hal. 43-65
- Gunadi. (2010) *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan Edisi update*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Guenther, David A. (1994) "Earnings Mmanagement in Response to Corporate Tax Rate Changes: Evidence from the 1986 Tax Reform Act". *The Accounting Review*, Vol. 69, No 1, hal 230-243.
- Ghozali, Imam. (2009) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang:Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I, dan A. Chariri, (2003) *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Halim, Julia, Carmel Meiden, dan Rudolf Lumban Tobing. (2005) "Pengaruh manajemen laba pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang termasuk dalam indeks LQ-45". *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo. 15-16 September. hal. 117-135.
- Harnanto, (2003) *Akuntansi Keuangan Menengah*, Edisi 2003/2004, BPFE Yogyakarta.
- Healy, P.P. "The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decision." *Journal of Accounting and Economic* Vol.7, No.1-3, hal 85-107.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo.(2009) "*Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*", BPFE, Yogyakarta.
- Januarti, Indira. (2003) "Analisis Pengaruh Faktor Perusahaan, Kualitas Auditor, Kepemilikan Perusahaan terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern (Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)". *Simposium Nasional Akuntansi XII* , no. 6, hal 1-26.
- Kesumaning. (2009) "Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal serta Pajak Tangguhan Terhadap Persistensi Laba" *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi* Vol 12, No. 13, hal 132-147.
- Murhaban, Mohamad. (2003) "Perlakuan Pajak Tangguhan Pada Laporan Keuangan". *Jurnal Akuntansi* . Vol. 43.
- Purba. (2009) *International Financial Reporting Standards*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Philips, Pincus dan S.O. Rego. (2003) "Earnings Mangement :New Evidence Based on Deferred Tax Expense". *The Accounting Review* . No. 78, hal 491-521.
- Santoso, Singgih. (2012) "*Panduan Lengkap SPSS*", PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Scott, William R. (2011) *Financial Accounting Theory 6th Edition*. Prentice Hall Canada Inc.
- Sugiyono. (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyanto dan Midiastuti. (2003) Seasoned Equity Offerings: Benarkah Under performance Pasca Penawaran? . Artikel ini diakses tanggal 10 November 2010 dari <http://re-searchengines.com/sulistianto.html> .
- Suranggane, Zulaikha. (2007) “Analisis Aktiva Pajak Tangguhan dan AkruaI Sebagai Prediktor Manajemen Laba”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 4, No. 1, hal. 77-49.
- Suwito dan Herawaty. (2005) ”Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tindakan Perataan Laba yang dilakukan oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta”. *SNA VIII Solo*.
- Thomas Sumarsan. (2010) *Sistem Pengendalian Manajemen* . Penerbit Index.
- Waluyo. (2012) *Akuntansi Pajak edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Watts, R. L., J. L., Zimmerman. (1986) *Positif Accounting Theory*. New Jersey: Prentice-Hall International Inc.
- Widyaningdyah, Agnes Utari. (2001) “Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *earnings management* pada perusahaan *go public* di Indonesia”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. November. Vol. 3. No. 2. hal. 89-101.
- Widyaningsih. (2012) *Tren dan Perspektif Manajemen Laba di Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Yulianti. (2004) “Kemampuan Beban Pajak Tanggguhan dalam Memprediksi Manajemen Laba”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 2, No. 1. Juli, pp:107-129.
- Yulianti. (2005) “Praktik Manajemen Laba Perusahaan Dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak Sesuai UU No. 36 Tahun 2008”. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*.